KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Masuk Usia 74, DPR Diminta Terus Berbenah
Tanggal : Jumat, 30 Agustus 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Masuk Usia 74, DPR Diminta Terus Berbenah

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat kemarin memasuki usia 74 tahun. Kendati demikian, kinerja para wakil rakyat dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran masih jauh dari kata memuaskan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Koordinator Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menilai kinerja legislasi DPR masih jauh dari target. Meskipun Ketua DPR mengklaim sudah mengesahkan 77 RUU, tapi yang harus dilihat tidak hanya seluruh RUU yang disahkan DPR yang sebagian besar merupakan RUU kumulatif terbuka, yaitu 38 RUU sejak 2015. Kumulatif terbuka itu berisi pengesahan perjanjian internasional, pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) maupun RUU APBN, RUU APBN-P dan pertanggungjawaban APBN. "Artinya, 77 RUU yang disahkan tersebut, sebagaimana disampaikan Ketua DPR, masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional di luar kumulatif, yaitu 189 RUU," papar Hanafi.

Selain itu, kualitas undang-undang yang dihasilkan juga patut dipertanyakan, terutama dari sudut pandang representasi. Undang-undang yang baik adalah ketika disahkan tidak menyisakan komplain karena aspirasi publik telah terakomodasi dan dikelola dengan baik pada saat pembahasan RUU terkait. Namun, saat ini ada 87 gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap 9 undang-undang yang disahkan oleh DPR sejak 2015. "Gugatan ke MK adalah bentuk komplain terhadap materi dalam undang-undang oleh sejumlah kelompok masyarakat yang berkepentingan terhadap undang-undang tersebut,'" sebut Hanafi.

Karena itu, berdasarkan fakta di atas, DPR seharusnya mulai mereviu agenda parlemen modern untuk dipertajam kembali pada periode berikutnya, yaitu parlemen yang terbuka, representatif, dan menggunakan teknologi informasi. "Agenda parlemen modern seharusnya mampu mengatasi komplain publik terhadap kinerja parlemen dan meningkatkan efektivitas kerja para anggota DPR," ucap Hanafi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai banyak capaian para wakil rakyat selama lima tahun terakhir. Di bidang legislasi misalnya DPR mengklaim telah mengesahkan 77 undang-undang (UU). Terkait fungsi pengawasan sepanjang periode 2014-2019, DPR telah membentuk 8 tim pengawas dan pemantau, 1 panitia khusus (pansus) angket serta, 40 panitia kerja (panja), yang dibentuk pimpinan serta anggota DPR sebagai bentuk pengawasan eksekutif. "Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Tahun Sidang 2018-2019, DPR telah membahas dan menyetujui bersama Presiden sebanyak 15 RUU untuk disahkan menjadi UU. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah RUU yang telah selesai dibahas dari awal periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 sampai dengan Agustus 2019 berjumlah 77 RUU," katanya dalam Pidato Laporan Kinerja DPR Dalam Rangka HUT ke-74 di Ruang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Terkait fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif, Bamsoet mengungkapkan, DPR telah membentuk berbagai tim pengawas dan pemantau, panitia khusus, ataupun panitia kerja. "Pada Tahun Sidang 2018-2019, DPR memiliki 8 tim yang dibentuk di Pimpinan DPR. Tim tersebut sebagian besar merupakan tim yang dibentuk dan melaksanakan tugasnya dari tahun sidang yang lalu, bahkan beberapa di antaranya dimulai sejak awal periode 2014-2019," katanya.

Bamsoet memaparkan, keberadaan tim pengawas ini memang dimaksudkan untuk secara konsisten melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan, baik oleh pemerintah maupun internal DPR. "Agar dapat dipastikan kemanfaatannya bagi seluruh rakyat," imbuhnya.

Adapun tim yang dibentuk oleh pimpinan DPR tersebut, di antaranya Tim Implementasi

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

PRESTASI WAKIL RAKYAT

DPR memasuki usia ke-74 tahun. Para wakil rakyat terus berbenah menjalankan tiga fungsi utama di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

CAPAIAN BIDANG LEGISLASI

2015

Rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas:
40 RUU
Berhasil disahkan:
14 UU

Rincian :

1. Penetapan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
2. Perppu Nomor 2/2014 tentang perubahan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)
3. Perubahan UU Pemda
4. Perubahan UU Pilkada
5. Penetapan Perppu Nomor 1/2015 tentang perubahan UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
6. Pencabutan Perppu Nomor 4/2007 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

2016

Rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas:
51 RUU
Berhasil disahkan:
20 UU

Rincian :

1. UU Penjaminan
2. UU Tabungan Perumahan Rakyat
3. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
4. UU Penyandang Disabilitas
5. Perubahan UU Pilkada hasil penetapan Perppu
6. UU Pengampunan Pajak
7. UU Paten
8. Perubahan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
9. UU Merek dan Indikasi Geografis

2017

Rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas:
52 RUU
Berhasil disahkan:
18 UU

Rincian :

1. UU Sistem Perbukuan
2. UU Pemajuan Budaya
3. UU Arsitek
4. Perppu Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
5. UU Pemilu
6. Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Ormas
7. UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

2018

Rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas:
50 RUU
Berhasil disahkan:
11 UU

Rincian :

1. UU Kepalangmerahan
2. Perubahan Kedua UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)
3. UU Kekarantinaan Kesehatan
4. UU Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

2019

Rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas:
55 RUU
Berhasil disahkan:
12 UU

Rincian :

1. UU Kebidanan
2. UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
3. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. UU Sumber Daya Air
5. UU Pekerja Sosial

KORANSINDO

INFOGRAFIS: KORAN SINDO/BOBBY FIRMANSYAH

Reformasi DPR dan Tim Pengawas DPR terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam fungsi anggaran, lanjut Bamsoet, DPR telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh DPD RI melalui Badan Anggaran (Banggar).

● **kiswondari**

CAPAIAN BIDANG PENGAWASAN

- Tim Pengawas
- Tim Implementasi Reformasi DPR;
- Tim Pengawas DPR terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Pelaksanaan UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Pelaksanaan UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
- Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana;
- Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP);
- Tim Penguatan Diplomasi Parlemen;
- Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan.
- Panitia Khusus (Pansus)
- Pansus Panitia Angket DPR RI terhadap Pelindo II